

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam film dokumenter, setiap karya komunikasi visual merupakan gambaran dari perspektif pembuat film terhadap suatu situasi. Saat disajikan kepada penonton, film tersebut juga menciptakan pemahaman yang berbeda, sehingga muncul interpretasi tambahan oleh penonton terhadap ekspresi pembuat film tersebut. (Butchart, 2014). Karena itu, seorang sutradara film bernama Dandhy Laksono merilis sebuah film dokumenter dengan judul “Dirty Vote”. Menurutnya, tujuan dari film tersebut adalah untuk memberikan edukasi kepada publik melalui tontonan yang menggugah pikiran selama periode pemilu 2024 (Saptohutomo & Meiliana, 2024). Film dokumenter dapat digunakan untuk menyampaikan informasi dengan cara yang menarik dan mudah dipahami. Ini bisa menjadi metode efektif untuk mengkomunikasikan hasil penelitian atau informasi yang kompleks kepada audiens.

Film dapat menjadi alat advokasi untuk mengkritik institusi sosial dan politik, memperjuangkan keadilan sosial, dan mempromosikan perubahan budaya. Contoh, film "Pengkhianatan G30S/PKI" digunakan sebagai media kampanye politik oleh Jokowi (Andriana, 2015). Menjelang pemilu, minat publik terhadap isu-isu politik dan kandidat biasanya meningkat, sehingga dokumenter yang dirilis pada saat ini dapat menarik perhatian yang lebih besar dan memiliki dampak yang lebih besar. Sebelumnya, Dandhy Dwi Laksono juga telah merilis beberapa film yang menyinggung isu-isu politik seperti film “Jakarta Unfair” yang dibuat menjelang Pilkada DKI Jakarta 2017 dan menampilkan kritik terhadap sistem demokrasi di Jakarta. Kemudian ada film “Sexy Killers” yaitu Film dokumenter yang membahas jaringan oligarki yang bercokol pada kedua pasangan Jokowi-Maruf dan Prabowo-Hatta. Film ini telah ditonton lebih dari 20 juta kali dan dirilis pada tahun 2019, yakni tahun pemilihan umum.

Pada 11 Februari 2024, muncul sebuah film dokumenter berjudul “Dirty Vote” yang dirilis oleh akun Youtube PSHK (Pusat Studi Hukum dan Kebijakan),

dan disutradarai oleh Dandhy Dwi Laksono. Dandhy sendiri pernah menjadi jurnalis yang cukup dikenal dengan liputannya yang investigatif. Pada awal bulan Maret 2024, film “Dirty Vote” telah mencapai 9,4 juta penonton melalui akun youtube PSHK. Dalam film tersebut dihadirkan tiga orang ahli hukum tata negara bernama Zainal Arifin Mochtar, Bivitri Susanti, dan Feri Amsari. Ketiga ahli hukum tata negara tersebut berkontribusi dalam menganalisa runtutan berita dugaan kecurangan yang terjadi pada pemilu 2024.

Menurut Guru Besar Hukum Konstitusi Universitas Pakuan, Profesor Andir Asrun menyampaikan bahwa kemunculan film “Dirty Vote” sangat mengganggu masa tenang pemilu 2024, karena berisikan fitnah tanpa dasar terhadap Presiden Jokowi. Namun sebaliknya, dilansir oleh situs resmi Universitas Airlangga, UNAIR News (11/02/2024) mengutip sebuah tanggapan dari Dr Suko Widodo Drs M Si selaku pakar komunikasi politik terkait “Dirty Vote”. Menurut Suko, perilsan film dimasa tenang pemilu tidak memberikan dampak signifikan terhadap proses pemilu. Sebab pada intinya, film tersebut hanya membahas narasi-narasi yang telah banyak dikonsumsi sebelumnya. Dandhy Laksono, selaku sutradara dari film “Dirty Vote” sendiri juga mengungkapkan melalui potongan wawancaranya bahwa Ia mengharapkan film dokumenter ini dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat serta menjadi topik pembicaraan yang banyak dijadikan sebagai ruang diskusi dalam berbagai forum (Saptohutomo & Meiliana, 2024).

Seperti yang diharapkan oleh sutradaranya sendiri, film dokumenter Dirty Vote sempat menjadi perbincangan paling atas dan memunculkan 400.000 postingan pada media sosial Twitter di tanggal 13 Februari 2024, yakni satu hari tepat sebelum pemilu dilaksanakan (CnbcIndonesia.com). Bahkan pada kolom komentar film Dirty Vote di Youtube, telah mencapai 113,446 komentar per tanggal 29 April 2024. Dalam kolom komentar tersebut, banyak netizen yang mengapresiasi informasi-informasi yang telah disampaikan melalui film. Seperti gambar di atas, setiap penonton memiliki persepsinya masing-masing dalam memaknai film dokumenter Dirty Vote sendiri.

Tabel 1.1. Komentar Film Dokumenter Dirty Vote

Pro	Kontra
<p>@iwanfajar6310 Mantap film ini...salut tuk semua yg terlibat di dimnya...penggabungan sinkronisasi data2 dari prapemilu sampai data2 update..sangat kreatif dan luar biasa..</p> <p>@johanespsr7874 Saya sangat berterima kasih sekali kepada seluruh pembuat film dirty vote, dengan film ini saya semakin yakin utk memilih pak prabowo dan mas Gibran sebagai presiden dan wakil presiden, utk Indonesia dan rakyat Indonesia. Merdeka</p> <p>@adityabimantara9000 Kami tidak kekurangan orang cerdas, tapi kita kekurangan orang jujur . Terimakasih team Dirty Vote telah berani menyuarkan hal ini . Semoga selalu dalam Lindungan Tuhan</p> <p>@Sastra_Wangi Dokumen ini semoga menjadi kekal dalam sejarah, termasuk ditulis dalam buku. Terima kasih orang2 yg terlibat dalam proses pembuatan karya luar biasa ini. Karya anda akan kami bantu untuk viral dengan memberikan banyak komen dalam video ini.</p>	<p>@user-tc4zh3mz7q Film ini adalah konspirasi ,dalam arti memecah belah bangsa</p> <p>@tyapitenk5596 ini bukan film . . . Ini cuma pihak2 yang tidak pro dengan pemerintahan saja yang mau menjatuhkan dengan mengait2kan dengan pemilu. Ini drama pembodohan</p> <p>@dwiplos3804 Film penuh karangan 3orang yg membenci presiden Jokowi</p> <p>@tatatiar4323 Gua pikir film beneran , ternyata cmn dia bercerita asumsi yg kebenarannya belum tentu terbukti</p>

Sumber: www.youtube.com/@PSHKIndonesia.

Beberapa media massa menyiarkan diskusi dan wawancara bersama masing-masing narasumber pada film Dirty Vote untuk mendapatkan penjelasan lebih lanjut terkait film dokumenter yang telah dibuat. Salah satu episode acara TV "Rakyat Bersuara" yang diunggah oleh Inews pada tanggal 5 Maret 2024 menampilkan Feri Amsari sebagai salah satu narasumber dari film "Dirty Vote". Dalam kesempatan itu, Feri membahas dasar penelitian film tersebut, menyatakan bahwa semua informasi dalam film didasarkan pada riset yang cermat. Namun, hanya informasi yang dianggap potensial yang dipilih untuk disajikan, sementara yang tidak memiliki potensi tidak dimasukkan dalam film. Selanjutnya, Feri menjelaskan mengenai transparansi yang diterapkan dalam film tersebut, khususnya dalam hal paparan data. Menurutnya, data struktural yang disajikan dalam film itu jelas dan terbuka untuk dilihat oleh siapa pun. Bahkan, menurutnya, Presiden Jokowi tidak ragu-ragu lagi untuk menunjukkan keterlibatannya dalam hal tersebut. Bivitri, narasumber lain dalam acara tersebut, juga memberikan pernyataan kepada media massa Metro TV bahwa tidak ada yang benar-benar baru atau rahasia dalam informasi yang disajikan dalam film. Semua data yang disajikan dalam film hanyalah data yang telah dipublikasikan sebelumnya. Zainal Arifin, narasumber lain dari film "Dirty Vote", juga memberikan pandangan serupa dalam

sebuah video podcast yang membahas film tersebut. Dalam video yang diunggah oleh akun *mojodotko*, Zainal Arifin menekankan pentingnya kesetiaan pada keadilan dalam penayangan data, bahwa semua data harus disajikan dengan jelas dan terbuka untuk diperiksa, dan bahwa mereka serius dalam pendekatan mereka. Jika ada data yang tidak terverifikasi, lebih baik untuk tidak disertakan dalam film tersebut.

Konsep transparansi politik sendiri menjadi tema utama dalam film dokumenter *Dirty Vote*. Hal tersebut ditunjukkan dengan banyaknya pemaparan data serta dokumen berupa berita hingga hasil survei yang diungkap untuk membantu pemetaan analisis yang dilakukan oleh tim *Dirty Vote*. Transparansi merupakan salah satu implementasi dari sebuah tata Kelola yang baik, di mana pemerintah memberikan transparansi kepada masyarakat terkait kegiatan yang mereka lakukan. Penting untuk diingat bahwa menyediakan informasi yang diperlukan dan diinginkan sesuai dengan harapan masyarakat adalah tanggung jawab pemerintah untuk memenuhi hak-hak rakyat (Nugraha et al, 2022). Transparansi juga merupakan bentuk keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi tersebut (Mardiasmo, 2018).

Dalam era globalisasi, transparansi informasi bagi masyarakat memiliki peran yang sangat penting. Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik merupakan salah satu upaya untuk mendorong keterbukaan informasi di Indonesia. Undang-undang ini memberikan dasar hukum bagi hak individu untuk memperoleh informasi yang bersifat publik (Rohman, 2021). Salah satu fenomena transparansi politik yang marak dijumpai di Indonesia ialah kasus korupsi dana pemerintahan. KPK selaku lembaga yang bertanggung jawab atas pemberantasan korupsi yang ada di Indonesia, menegaskan untuk mengoptimalkan seluruh perekaman sidang agar dapat di akses oleh masyarakat umum. Johanis Tanak sebagai Wakil Ketua KPK menyebutkan bahwa rekam sidang berguna untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan, serta sebagai sarana pengawasan bagi KPK sendiri. Hal tersebut dilansir pada artikel yang dipublikasikan oleh website resmi KPK pada tanggal 24 Februari 2024. Contoh fenomena yang telah dijelaskan tersebut dapat menjadi salah

satu gambaran bahwa dalam dunia politik, transparansi perlu diterapkan demi meningkatkan kepercayaan masyarakat.



Gambar 1.1. Feri Amsari dalam Film Dirty Vote (Timestamp 01:54:09)
(www.youtube.com/@PSHKIndonesia)

Film Dirty Vote memiliki *Preferred reading* yang didapatkan melalui sudut pandang ketiga narasumber pada akhir film sebagai *closing statement*. Sebagai *closing statement*, pada menit 01:54:09, Feri Amsari menyatakan bahwa rencana kecurangan yang terstruktur dan luas sebenarnya dirancang bersama dengan pihak lain yang telah berkuasa selama 10 tahun terakhir. Hal ini menunjukkan bahwa kecurangan adalah hasil kerjasama, bukan tindakan individu, untuk mempertahankan kekuasaan.



Gambar 1.2. Zainal Arifin dalam Film Dirty Vote (Timestamp 01:54:21)
(www.youtube.com/@PSHKIndonesia)

Dalam cuplikan pada *timestamp* 01:54:21, Zainal arifin memberikan pernyataan bahwa persaingan politik yang sengit membuat desain kecurangan jatuh

ke tangan satu pihak yang dominan, yang menggunakan kekuasaannya untuk mengontrol aparat dan anggaran. Ini menunjukkan bahwa kecurangan dipicu oleh ambisi politik dan perjuangan kekuasaan. Kemudian, Bivitri Susanti juga mengemukakan pernyataannya untuk mengakhiri film



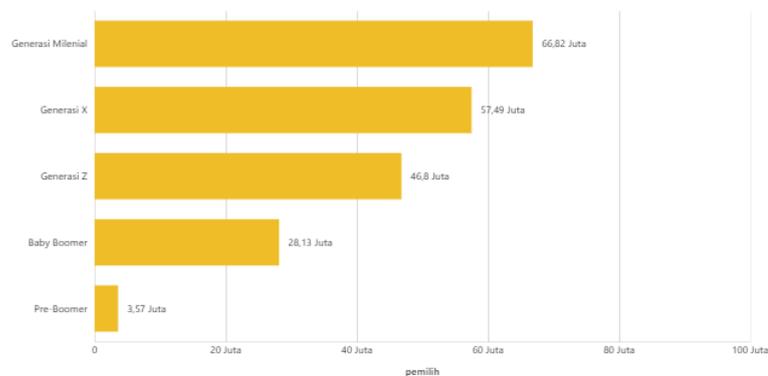
Gambar 1.3. Bivitri Susanti dalam Film *Dirty Vote* (Timestamp 01:54:36)
(www.youtube.com/@PSHKIndonesia)

Pada *timestamp* 01: 24:36 Bivitri menekankan bahwa rencana kecurangan sebenarnya tidak terlalu rumit, bahkan telah dilakukan di banyak negara dan dalam sejarah. Dia menyatakan bahwa kecurangan semacam ini tidak memerlukan bukan kecerdasan yang luar biasa, melainkan hanya perlu mental culas dan tahan malu. Dari ketiga pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa *preferred reading* film *Dirty Vote* adalah kecurangan yang terjadi menjelang pemilu sudah direncanakan secara bersama dengan pihak yang berkuasa selama 10 tahun, tanpa memerlukan kecerdasan politik.

Film mampu mengirimkan sebuah pesan melalui tayangan yang dilengkapi dengan gambar sekaligus suara sehingga mampu mempengaruhi penonton (Faturusyiddin & Hidayati, 2024). Pesan atau makna yang disampaikan melalui film dapat memberikan pemaknaan yang berbeda bagi khalayak. Hal ini dijelaskan lebih lanjut dengan teori resepsi yang dikemukakan oleh Stuart Hall. Maka dari itu, penelitian ini dilakukan menggunakan metode analisis resepsi untuk melihat bagaimana sebuah proses *encoding* dan *decoding* menyebabkan keberadaan posisi pemaknaan yang berbeda bagi khalayak, yaitu posisi hegemoni dominan, negosiasi, dan oposisi. Encoding merupakan langkah di mana pembuat media,

seperti pembuat film dokumenter, menciptakan makna dalam konten yang mereka hasilkan. Sebaliknya, decoding adalah tahap di mana individu memaknai dan memahami konten media tersebut secara mendalam (Gassani & Nugroho, 2019). Ketika seseorang menerima pesan, mereka melakukan proses *decoding* berdasarkan pada persepsi, pemikiran, dan pengalaman masa lalu mereka. Melalui decoding, kita dapat memahami bagaimana masyarakat menerima dan merespons informasi dari media, yang sering kali menjadi sumber utama informasi bagi banyak orang. Masyarakat secara tidak sadar menerima, menyetujui, atau mendukung apa yang disampaikan oleh ideologi dominan yang diwakili oleh media (Morissan, 2015).

Penelitian ini akan membahas pemaknaan mendalam tentang pemaknaan transparansi politik pada film “Dirty Vote” bagi generasi z dan millennial. Menurut data yang dilaporkan melalui situs resmi katadata, diprediksi bahwa pemilu 2024 akan didominasi oleh kelompok generasi Z dan milenial. Fakta ini juga telah dikonfirmasi oleh KPU dalam Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi DPT, di mana jika dijumlahkan, pemilih dari generasi Z dan milenial mencapai 113 juta pemilih atau setara dengan 56,45% dari total pemilih pada tahun 2024.



Gambar 1.4. Data pemilih pemilu berdasarkan kategori usia (Databooks.katadata.co.id)

Temuan ini menjadi dasar serta alasan mengapa pemaknaan transparansi politik pada film Dirty Vote akan berdampak lebih besar jika dilakukan pada generasi Z dan milenial. Generasi Z dianggap sebagai kelompok yang lahir dalam era digital, yang memungkinkan mereka memanfaatkan keterampilan teknologi untuk aktif terlibat dalam politik (Turner & Turner, 2018). Berdasarkan situs resmi Kementerian Komunikasi dan Informatika, dalam konteks demokrasi, ada berbagai kelompok di masyarakat yang memengaruhi tingkat partisipasi politik. Salah

satunya adalah kaum muda, yang dalam Undang-Undang nomor 40 tahun 2009 tentang Kepemudaan, didefinisikan sebagai warga negara Indonesia berusia antara 16 hingga 30 tahun. Mereka juga dikenal sebagai Generasi Z dan Generasi Milenial. Badan Pusat Statistik mendefinisikan Generasi Z sebagai penduduk Indonesia yang lahir antara tahun 1997 hingga 2012, sementara Generasi Milenial adalah yang lahir antara tahun 1981 hingga 1996. Oleh karena itu, akan lebih tepat jika proses pemaknaan dilakukan oleh demografi informan yang mendominasi pemilihan umum hingga lebih dari setengah penduduk yang melaksanakan pemilu pada tahun 2024.

Film *Dirty Vote* penting untuk diteliti pemaknaannya melalui sudut pandang dari generasi Z dan milenial. Hal didukung oleh data yang telah dipaparkan sebelumnya bahwa generasi Z dan milenial merupakan generasi yang mendominasi lebih dari setengah jumlah pemilih di Indonesia pada tahun 2024. Selain itu, disampaikan pula dalam sebuah jurnal lokal bahwa generasi Z dan milenial menggunakan platform daring seperti media sosial untuk menyuarakan pendapat mereka dan mempengaruhi pendapat masyarakat. Generasi ini telah berhasil dalam memperjuangkan isu-isu sosial yang ada. Milenial dan Gen Z telah terbukti sebagai kekuatan penting dalam proses pemilihan umum. Meskipun memiliki pengaruh yang besar, mereka sering memiliki pandangan politik yang berbeda dengan generasi yang lebih tua (Hutajulu et al, 2024). Perbedaan pendapat serta pandangan politik mereka lah yang akan menjadi fokus pada penelitian ini.

Nadia Annastasia Ningrum melakukan sebuah penelitian yang memiliki konsep serupa dengan judul "Analisis Resepsi Aktivis Organisasi Mahasiswa Ekstra Kampus di Surabaya Terhadap Isu Komunisme dalam Film *Senyap*" (Ningrum, 2022). Penelitian tersebut menggunakan metode analisis resepsi dengan pendekatan kualitatif. Dalam penelitian tersebut, dijelaskan bahwa informan dikelompokkan menjadi empat kategori berdasarkan latar belakang mereka, yaitu organisasi berbasis agama Islam, Kristen, Katolik, dan Nasionalis. Hasil analisis menunjukkan bahwa pemaknaan informan bervariasi tergantung pada latar belakang organisasi, pengalaman, dan tingkat literasi masing-masing informan.

Pada penelitian ke dua, ditulis dengan judul "Analisis Resepsi terhadap Film Dokumenter "Danau Begantung" di Lanskap Katingan-Kahayan" Penelitian ini

juga merupakan analisis resepsi yang dilakukan pada film dokumenter (Lestari & Rahadjo, 2017) . Namun tema besar dari film ini sendiri ialah terkait isu kearifan lokal serta isu-isu sosial yang terjadi. Penelitian tersebut berhasil mengelompokan informan ke dalam posisi dominan-hedemoni, posisi negosiasi, dan posisi oposisi. Penelitian ini sangat serupa secara metode dan konsep, hanya saja tema besar yang digunakan cukup berbeda, yakni membahas transparansi politik.

Pada penelitian terakhir, berjudul “Analisis Semiotika Pada Film Senyap Karya Joshua Oppenheimer” (Widianto et al, 2015). Penelitian ini membahas sebuah film dokumenter yang juga menuai pro-kontra di masyarakat. Film ini terdapat banyak makna dan tafsir sehingga penelitian ini mencari konstruksi makna dalam film senyap menggunakan analisis semiotika. Penelitian terdahulu ini juga mencari pengungkapan dibalik keterkaitan film Senyap dan isu komunisme di Indonesia. Namun, secara tema besar penelitian terdahulu yang terakhir ini membahas bagaimana film senyap mengungkap Sejarah kekerasan yang dialami oleh anggota PKI.

Dari tiga penelitian terdahulu yang sudah dikumpulkan, penelitian ini memiliki perbedaan yang belum ditemukan sebelumnya. Penelitian ini penting untuk dilakukan karena belum ada penelitian analisis resepsi yang membahas tentang transparansi politik dalam sebuah film dokumenter, khususnya Dirty Vote. Penelitian ini penting dilakukan karena membantu memperdalam pemahaman tentang bagaimana pemilih pemula menafsirkan dan memaknai informasi politik dalam konteks pemilihan presiden, terutama terkait transparansi politik yang ditampilkan dalam film. Melalui penelitian ini, kita dapat mengeksplorasi peran media dalam komunikasi politik, serta memberikan wawasan terkait pentingnya transparansi dalam menjaga sistem politik di negara demokrasi.

Pada penelitian ini, peneliti akan melakukan *purposive sampling* dalam menentukan informan sebagaimana informan yang dituju ialah generasi z maupun milenial yang berpartisipasi dalam pemilihan umum di tahun 2024 dan pernah menonton film Dirty Vote. Metode yang akan digunakan pada penelitian ini ialah pendekatan kualitatif, dengan analisis resepsi. Objek penelitian ini ialah film dokumenter Dirty Vote. Teknik pengumpulan data yang dilakukan ialah wawancara

mendalam terkait pemaknaan film serta pengumpulan data sekunder melalui artikel, jurnal, dan buku.

1.2. Rumusan Masalah

Bagaimana pemaknaan generasi Z dan milenial terhadap transparansi dalam politik yang disajikan dalam film dokumenter Dirty Vote dalam konteks pemilihan presiden 2024?

1.3. Tujuan Penelitian

Untuk melihat pemaknaan generasi Z dan milenial terhadap transparansi dalam politik yang disajikan dalam film dokumenter Dirty Vote dalam konteks pemilihan presiden 2024?

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Akademis

Peneliti berharap studi ini memiliki dapat menjadi panduan untuk studi komunikasi khususnya dalam komunikasi politik yang membahas pemaknaan khalayak terhadap transparansi politik.

1.4.2. Manfaat Praktis

Memberikan pandangan yang berharga terkait bagaimana Gen Z dan milenial memaknai dan merespons konten dokumenter khususnya dalam bidang politik. Dengan mengetahui preferensi, nilai, dan persepsi audiens, seorang pembuat film dapat membuat konten yang lebih relevan dan menarik bagi kelompok usia ini.